

BULOG JAMIN

Stok Beras Cukup, Harga Terjangkau

JAKARTA (KR) - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan pasokan beras nasional yang dikuasai Pemerintah berada dalam jumlah yang aman untuk enam bulan ke depan, dan dapat segera digelontorkan kapan saja melalui operasi pasar setiap hari, sebagai upaya mempertahankan stabilitas harga pangan.

"Masyarakat jangan khawatir, Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau, walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Kami melakukan pemantauan secara terus-menerus di tengah situasi saat ini agar tetap terkendali," kata Budi Waseso di Jakarta, Jumat (18/11).

Budi Waseso mengemukakan hal itu terkait munculnya isu mengenai ancaman kelangkaan pangan. Ia menjelaskan, terjadinya kenaikan harga beras karena beberapa faktor seperti anomali cuaca, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan juga situasi dalam negeri yang memasuki musim tanam.

Kegiatan Operasi Pasar (OP) atau Program Keterediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) dilakukan sepanjang tahun oleh Bulog, katanya, dan instrumen tersebut efektif menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

"Sampai pagi ini kami sudah menggelontorkan beras operasi pasar di seluruh Indonesia dengan jumlah total sebanyak hampir 1 juta ton dan selanjutnya seti-

ap hari kami akan gelontorkan terus sampai dengan panen raya berikutnya," tegas Budi Waseso.

Ia menjelaskan, jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini 625.000 ton beras di dalam negeri dan Bulog sudah bekerja sama dengan mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500.000 ton beras komersil di luar negeri yang bisa ditarik kapan saja jika stok dalam negeri habis. "Total stok yang kami punya sekarang sudah hampir 1,2 juta ton yang tersimpan di Gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia, ditambah stok beras komersil hasil kerja sama di luar negeri," kata Budi Waseso.

Ia memastikan seluruh jaringan yang bekerja sama dengan Perum Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara offline maupun online, seperti Rumah Pangan Kita yang tersebar di seluruh Indonesia serta jaringan ritel modern.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun daerah guna menjaga harga beras di tingkat konsumen tetap stabil atau tidak mengalami lonjakan.

Sementara itu Kementerian Pertanian menyebutkan sebanyak 1,8 juta ton beras tersedia di penggilingan dan dapat diserap oleh Bulog untuk memenuhi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sehingga dinilai tidak perlu impor.

Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Ismail Wahab mengatakan, stok beras nasional hingga saat ini sebanyak 8,05 juta ton dengan rincian sebanyak 1.868.414 ton terdapat di penggilingan, 831.805 ton di pedagang, dan sisanya berada di rumah tangga.

Ismail menjabarkan, dari seluruh wilayah Indonesia penghasil beras menyanggupi menyediakan pasokan untuk pengadaan beras Bulog sebanyak 353.620 ton. "Memang kalau dilihat beras tidak banyak di penggilingan, tidak banyak di pedagang, banyaknya di rumah tangga. Kenapa banyak di rumah tangga, karena kita tahu Bantuan Pangan Nontunai langsung ke rumah tangga. Sehingga beras lebih banyak di rumah tangga," kata Ismail.

Ismail menyebut data tersebut merupakan data hasil dari kerja sama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Badan Pusat Statistik.

Ismail Wahab menyebut, alasan penyerapan Bulog yang minim dikarenakan perusahaan BUMN pangan tersebut tidak mau membeli dengan harga yang ditawarkan oleh penggilingan. (Ant/San)-d

DIGELAR PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY

Regol, Pintu Masuk Mengisi Keistimewaan

YOGYA (KR) - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY dituntut untuk terus berinovasi. Pelaksanaan program dan kegiatannya harus disesuaikan dengan kondisi riil di masyarakat.

"Kalau layanan bisa dipercepat, kenapa mesti diperlambat. Kalau bisa diberi solusi, kenapa tidak disampaikan," terang Paniradya Pati Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho SP MSi dalam Rerasan Golek Solusi (Regol) bertema 'Kolaborasi Inovasi Regol Bregada Trengginas dengan Implementasi Satriya Berakhlak melalui Strategi Kreasibatik'.

Rerasan Golek Solusi (Regol) diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan DIY di Gedung Paniradya Kaistimewan DIY, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Jumat (18/11) malam, dan disiarkan *live streaming* di channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY <https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewan>. Kegiatan podcast ini didanai dengan Dana Keistimewaan.

Regol menghadirkan narasumber lain Ni Made Dwipanti Indrayanti ST MT (Kepala Dinas Perhubungan DIY), Ana Windyawati SH MH (Kepala Biro Organisasi Setda DIY) dan Ahmad Maruf SE MSi (Peneliti Inspect). Acara dimeriahkan komedian Aldo Iwak Kebo, Pursegi Panjang, Uud Kaya Canda dan Yanti Lemoe.

Menurut Aris, Paniradya Kaistimewan DIY menghadirkan acara Regol Bregada Trengginas sebagai media penyampaian program dan inovasi OPD kepada masyarakat. Regol singkatkan dari berdayakan DIY secara terintegrasi dan aspiratif dengan Dana Keistimewaan (Danais). "Regol ibaratnya pintu masuk untuk mengisi keistimewaan," katanya.

Adapun Bregada sing-



KR-Devid Permana

Rerasan Golek Solusi (Regol) bertema 'Kolaborasi Inovasi Regol Bregada Trengginas dengan Implementasi Satriya Berakhlak melalui Strategi Kreasibatik'.

katan kebersamaan untuk mencapai tujuan dalam rangka mengisi keistimewaan. Sedangkan Trengginas berarti berusaha tanpa menyerah dalam menghadapi masalah. "Kalau ada permasalahan secara cepat. "Harapan kita Regol tidak menjadi bagian dari upaya yang dilakukan secara normatif. Rerasan itu bisa dilakukan di mana saja, solusi juga bisa dimunculkan dari mana saja," kata Aris.

Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, Regol Bregada Trengginas menjadi pintu masuk dalam menyukseskan program Pemda DIY lewat Danais. Yogyakarta memiliki kawasan sumbu filosofis yang punya makna sangat luar biasa. Dishub DIY berkontribusi ikut mewujudkan sumbu filosofis termasuk Jalan Malioboro agar aman, nyaman bagi pengunjung. "Dengan Danais, Pemda DIY berusaha mewujudkan kawasan sumbu filosofis yang rendah karbon, rendah emisi dan rendah polusi," katanya.

Program inovasi Dishub DIY dalam mendukung sumbu filosofis, yaitu dengan penguatan kendaraan tradisional becak kayu dan

andong. Upaya penguatan kendaraan tradisional ini juga sudah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda), yaitu Perda Nomor 5 tahun 2016. "Inovasi becak kayu yang kita lakukan yaitu dengan tenaga penguat (pedal axis) bertenaga baterai yang memperpanjang pengayuh becak," katanya.

Selain itu ada pasukan yang diberi nama Jogo Margo untuk membantu Dishub dalam menjaga kawasan-kawasan istimewa agar tetap aman, nyaman. Tugasnya membantu masyarakat menggunakan jalan dengan baik dan tertib berlalu-lintas. "Kalau terjadi kemacetan (terutama di sumbu filosofis) tentu masyarakat tidak nyaman. Di sinilah peran Jogo Margo untuk memastikan jalanan itu tetap nyaman," katanya.

Sedangkan Ana Windyawati menuturkan, Pemda DIY sudah menerapkan budaya pemerintahan 'Satriya' singkatan dari Selaras, Akal Budi Luhur, Teladan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan Percaya Diri serta Ahli Profesional. Budaya Satriya ini merupakan pola

yang kemudian menjadi perilaku dan selanjutnya menjadi budaya. "Yaitu budaya pemerintahan untuk melayani publik. Budaya Satriya ini menjadi pedoman bagi pelayan masyarakat (ASN)," katanya.

Menurut Ana, pada 27 Juli 2021, Presiden RI Joko Widodo meluncurkan *core values* ASN 'Berakhlak' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa'. Berakhlak akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Lalu oleh Pemda DIY, budaya pemerintahan 'Satriya' yang sebelumnya telah dimiliki, diblanded/dikawinkan dengan *core values* ASN 'Berakhlak', sehingga menjadi budaya pemerintahan 'Satriya Berakhlak'.

"Budaya pemerintahan Satriya Berakhlak telah dilaksanakan di lingkungan Pemda DIY dan kita lanjutkan sampai ke kalurahan sesuai visi Bapak Gubernur DIY yaitu reformasi kalurahan, mereformasi pelayanan sampai tingkat kalurahan," katanya. (Dev)

KORBAN BERTAMBAH DUA ORANG

Penyidikan Dugaan Kasus Pencabulan Berlanjut

WATES (KR) - Proses penyidikan dugaan kasus pencabulan terhadap anak asuh di Panti Asuhan di wilayah Kokap terus berlanjut. Saat ini orban bertambah dua orang, sehingga jumlah keseluruhan korban sebanyak empat orang.

Plh Kasi Humas Polres Kulonprogo, Iptu Dwi Wijayanto, Jumat (18/11) mengatakan, korban dugaan kasus pencabulan di Panti Asuhan bertambah dua orang. Korban merupakan anak asuh Panti Asuhan tersebut.

Korban berasal dari Kulonprogo dan masih di bawah umur. Kasus ini diduga dilakukan pimpinan Panti Asuhan inisial MT. Tersangka diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak asuhnya mulai pertengahan 2020 hingga 2022.

"Tiga korban berumur 15 tahun, sedangkan satu korban lain umur 20 tahun," jelasnya.

Kasus ini muncul setelah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo melapor ke polisi pada 3 Oktober lalu. Laporan tersebut ditindak lanjuti petugas Satreskrim Polres Kulonprogo melakukan penahanan terhadap tersangka pada 7 Oktober 2022 dan telah memeriksa sebanyak 15 saksi.

"Hal yang diperiksa di antaranya teman korban di Panti Asuhan dan petugas yang melakukan pendampingan dari Dinsos P3A Kulonprogo. Kami masih melengkapi berkas perkara dan menunggu keterangan saksi ahli dari obgyn RSUD Wates serta psikiatri dari RSUP dr Sardjito," urainya.

Terpisah, Kepala Dinsos P3A Kulonprogo, Irianta menyampaikan telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melakukan pendampingan. Dua korban kondisinya sudah membaik, sedangkan dua korban lainnya mengalami trauma psikologis.

"Atas rekomendasi psikiater RSUP dr Sardjito mereka harus ada pendampingan psikologis setiap hari dan berkelanjutan. Karena terbatasnya SDM dan fasilitas di sini, maka kedua korban dititipkan ke shelter di Yogya," katanya.

Selain itu, pihaknya, juga membuat surat pendampingan ke organisasi non-pemerintah yakni Rifka Annisa. Di harapkan upaya perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi lengkap dan kuat. Sehingga kondisi kejiwaan dan keselamatan mereka terjamin," kata Irianta. (Dan/Rul)-d

KORBAN KANJURUHAN KE BARESKRIM

Tak Puas Hasil Penyidikan

JAKARTA (KR) - Tidak puas dengan penuntasan kasus Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang, sekitar 50 orang korban dan keluarga korban mendatangi Bareskrim Mabes Polri Jakarta, Jumat (18/11). Kedatangan korban dan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan ke Bareskrim didampingi tim kuasa hukum Anjar Nawan Yusky dan Sekjen Federasi Komisi Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) Andy Irfan.

"Sangat tidak puas, kami melihat (penanganan) itu belum profesional, belum akuntabel dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban," kata Sekjen KontraS Andy Irfan. Menurut Andi, belum semua pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam tragedi itu diproses secara hukum. Salah satunya eks Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan eks Kaporles Malang AKBP Ferli Hidayat. Tim kuasa hukum korban Tragedi Kanjuruhan Anjar Nawan Yusky mengatakan, ada tiga kelompok yang menjadi fokus para korban mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam tragedi tersebut.

Kelompok pertama adalah tindak

pidana yang mengakibatkan orang mati yaitu berkaitan dengan Pasal 338 tentang pembunuhan berencana, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang mati, Pasal 353 tentang penganiayaan berencana, Pasal 354 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan orang mati.

Kelompok kedua, terkait dengan korban luka yaitu tindak pidana yang mengakibatkan orang luka sebagaimana di atur dalam Pasal 351 ayat (1) dan (2), Pasal 353 ayat (1), dan Pasal 354 ayat (1). Hal yang tidak kalah penting yang selama ini dianggap belum tersentuh sama sekali diproses penegakan hukum yaitu kekerasan terhadap anak.

"Ada pidana, ada pelanggaran terhadap UU perlindungan anak itu salah satu materi laporan kami, ini berbeda sama sekali dengan yang selama ini berjalan di (Polda) Jatim dan di Polres Malang," papar Anjar.

Untuk itu, katanya, pihak korban dan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan mendatangi Bareskrim Polri agar perkara tersebut dapat ditangani di tingkat Mabes Polri, meng-

ingat perwira yang bertanggung jawab dalam tragedi tersebut berpangkat bintang dua.

Menurutnya, ada konflik kepentingan jika perkara yang diduga melibatkan perwira tinggi Polri itu ditangani di tingkat Polda maupun Polres. Pihak keluarga korban dan korban juga menuntut Mabes Polri menangani Tragedi Kanjuruhan seperti penanganan kasus Ferdy Sambo yang hanya ada satu korban meninggal dunia, sedangkan di Kanjuruhan ada 135 orang kehilangan nyawa.

Kedatangan keluarga korban dan korban Tragedi Kanjuruhan diterima Karobinspnal Bareskrim Polri Brigjen Pol Daniel Tifaona di lantai 11 Gedung Bareskrim Mabes Polri. Korban dan keluarga korban menyampaikan aspirasinya, mempertanyakan perihal penggunaan gas air mata oleh Polri serta tim advokasi melakukan konsultasi untuk mengkaji dan menelaah rencana pelaporan yang diajukan. Korban dan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan mendatangi sejumlah lembaga hukum seperti Komnas HAM, KPAI, Ombudsman, Kompolnas, LPSK dan Bareskrim Polri untuk menuntut keadilan. (Ful)-d

TINGKATKAN KAPASITAS LAYANAN NATARU

ASDP Siapkan 61 Kapal dan 55 Dermaga

JAKARTA (KR) - PT ASDP Indonesia Ferry telah mempersiapkan peningkatan kapasitas dan strategi layanan pada periode Angkatan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Ditargetkan, pelayanan penyeberangan dan pelabuhan dapat berjalan lancar, aman, nyaman dan selamat.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelyv Arifin mengatakan, manajemen telah mempersiapkan berbagai strategi sejak jauh hari, sehingga pelayanan Posko Angkutan Penyeberangan Periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang dapat terlaksana terhitung mulai 17 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023 (H-8 sampai H+10).

"Pertama, kapasitas angkut dan alat produksi dipastikan memadai jumlahnya. Total jumlah lintasan yang dipantau secara nasional selama Posko Nataru 2022-2023 sebanyak 10 lintasan di 12 Cabang. Ke-10 lintasan

terpantau nasional di antaranya Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, Hunimua-Waipirit, Tanjung Kelian-Tanjung Api-api, Bitung-Ternate, Bajoe-Kolaka, Kupang-Rote, dan Ajibata-Ambarita," tutur Shelyv di Jakarta, Jumat (18/11).

Menurutnya, layanan angkutan penyeberangan periode Nataru diperkirakan akan mengalami peningkatan seperti saat angkutan Hari Raya Idul Fitri (Lebaran) lalu seiring dengan kondisi pandemi Covid-19 yang telah menjadi endemi dan pergerakan masyarakat berangsur kembali normal. Diperkirakan, pada layanan Nataru di 10 lintasan pada 12 cabang terpantau nasional, ASDP akan melayani sekitar 3,45 juta orang dan 808.000 unit kendaraan. Adapun persiapan alat produksi, pada 10 lintasan di 12 cabang sebanyak 55 unit dan ka-

pal siap operasi sebanyak 61 unit kapal termasuk kapal Jembatan Nusantara.

Shelyv merinci, momen puncak arus libur Natal diperkirakan terjadi pada Kamis (22/12) atau H-3 dan Jumat (23/12) atau H-2. Periode libur tahun baru diprediksi terjadi pada Kamis (29/12) atau H+4 dan Jumat (30/12) atau H+5. Sedangkan puncak arus balik pada Minggu dan Senin (1-2/1) pada tahun 2023.

Selyv menambahkan, periode Nataru ASDP juga telah melakukan peningkatan kapasitas prasarana maupun sarana demi menunjang kelancaran layanan operasional Nataru mendatang. Peningkatan kapasitas di antaranya dilakukan di Dermaga IV Bakauheni, dari 40 ton menjadi 60 ton atau kapasitas dermaga yang tadinya untuk melayani kapal 5.000 GRT, ditingkatkan untuk dapat melayani kapal berukuran 10.000 GRT. (Imd)-d



KR-Antara/Hendra Nurdiyansyah

PERBAIKAN PAPAN SELANCAR: Perajin papan selancar, Bima, memperbaiki papan di Hawa Surfboard, Parangtritis, Bantul, Jumat (18/11). Dalam sehari Bima menerima permintaan papan selancar sebanyak 5-10 papan dengan biaya Rp 50.000-Rp 500.000 perpapan.